



Tarik KJP Maksimal Rp 50.000 Per Minggu

Penjaringan, Warta Kota

Menghindari terjadinya duplikasi dan salah sasaran penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta memperketat cara penarikan dana KJP. Jika tahun lalu penerima KJP dapat menarik tunai, sekarang tidak ada penarikan secara tunai.

Arie Budhiman, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, mengatakan, tahun ini dana KJP sebanyak Rp 2,2 triliun untuk 489.150 siswa di Jakarta. Jumlah siswa itu mulai dari pelajar sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

"Pencairan KJP untuk tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2013 yang berjumlah Rp 455 miliar untuk 349.000 siswa, dan tahun 2014 sebesar Rp 688 miliar untuk 573.000 siswa," kata Arie saat melakukan sosialisasi dana KJP di SMK Negeri 56 Pluit, Jakarta Utara, Kamis (21/5).

Arie mengatakan, pada tahun sebelumnya penerima KJP tidak tepat sasaran dan ada yang menerima ganda. Maka pada tahun ini penerima KJP sangat ketat



Warta Kota/angga bhagya nugaha

SOSIALISASI KJP — Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Arie Budhiman (dua kanan) didampingi Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwijonon (kanan) memberikan secara simbolis buku tabungan Kartu Jakarta Pintar (KJP) usai meresmikan kegiatan sosialisasi di SMK 56 Pluit, Jakarta Utara, Kamis (21/5).

untuk menghindari penerima ganda dan tidak salah sasaran.

Tidak semua siswa, kata Arie, mendapatkan KJP. Selain harus ikut seleksi ketat, beberapa persyaratan juga harus dilampirkan dalam mendapatkan Kartu KJP yang berbentuk ATM Bank DKI tersebut.

Beberapa persyaratan itu di antaranya harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang sesuai dengan kartu ke-

uarga, surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan sekolah yang mengusulkan siswa calon penerima KJP.

"Selain usulan itu, penerima juga harus menandatangani pakta integritas dan surat kelakuan baik," kata Arie.

Beberapa persyaratan kelakuan baik tersebut seperti tidak merokok, membolos, terlibat tawuran, terlibat bullying, dan terlibat geng motor. Ataupun

perbuatan asusila menjadi syarat mutlak siswa untuk memperoleh KJP.

Arie mengatakan, adanya pengetatan itu membuat penerima KJP menurun 20,07 persen dari prediksi awal. Penurunan itu disebabkan data ganda setelah Dinas Pendidikan melakukan verifikasi ulang.

Terbatas

Sementara itu, Eko Budiwijono, Direktur Utama Bank DKI Jakarta, mengatakan, aturan baru soal penarikan dana KJP untuk menghindari penggunaan uang KJP tidak tepat sasaran.

"Bank DKI menerapkan sistem pengambilan secara terbatas pada Kartu ATM KJP. Di antaranya pengambilan maksimal Rp 50.000 setiap satu minggu. Itu artinya, siswa hanya bisa mengambil uang di ATM per minggu saja," kata Eko.

Eko mengatakan, pengambilan uang itu pun tidak ada akumulasi. Misalnya uang tidak diambil pada minggu pertama, jangan harap bisa mengambil uang pada minggu kedua, ketiga, atau keempat. (m2)